

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan sebuah akuntabilitas dalam pemerintahan di Indonesia saat ini sangat diperlukan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan sebuah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, tidak terkecuali dengan pemerintah desa. Desa sebagai instansi pemerintahan paling terkecil diwajibkan untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan dari tugas dan fungsinya sesuai dengan perencanaan yang telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sebuah bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan pemerintah desa adalah berupa penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015 adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan bagian dari sebuah pelaporan keuangan. Komponen laporan keuangan secara lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 yang ada pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, sebuah informasi laporan keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa kriteria kualitatif yang telah disyaratkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 antara lain (i) relevan, (ii) andal, (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, dan (iv) dapat

dipahami. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 maka setiap pembuatan laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki kriteria yang telah disebutkan, tidak terkecuali dengan laporan keuangan desa. Apabila informasi yang ada pada Laporan Keuangan Desa memenuhi kriteria diatas mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah mampu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pelaporan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah desa juga wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa yang berupa Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut dipahami oleh pemakai. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya di pengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung pada pertimbangan ekonomi pemerintah. (Mardiasmo, 2002).

Sehingga jika telah terbentuk transparansi dan akuntabilitas pada pelaporan keuangan maka menunjukkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Pada pembuatan laporan keuangan yang berkualitas terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi, diantaranya sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya manusia tersebut.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti beberapa pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas.

Dalam penyusunan sebuah laporan keuangan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh sebab itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Ketidakmampuan sumber daya manusia pada pemerintah pusat, daerah maupun desa dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kesalahan pelaporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wati (2014) menjelaskan bahwa terdapatnya kompetensi pada sumber daya manusia (SDM) melatar belakangi seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi serta memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asril (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti terdapat kecenderungan ketika kompetensi sumber daya manusia (SDM) baik maka kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan juga baik.

Selain itu, optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Sistem informasi akuntansi merupakan urutan dari satu atau lebih komponen yang saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur dan teknologi informasi. Salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut harus terintegrasi dan berkelanjutan sebagai landasan sistem informasi keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saipullah (2017) dimana sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008, Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam sebuah pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi sehingga pengerjaan laporan keuangan dapat dikerjakan secara cepat, tepat, dan dapat meyakinkan masyarakat desa atas keakuratan, keandalan, serta ketepatan waktu pengerjaan laporan keuangan desa.

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati atau walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.

Dimana dalam Sistem Pengendalian Internal Desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kemudian dalam Pasal 112 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa (M.Khoiru Rusydi, IAI Jawa Timur). Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Yudianta, dkk (2012) menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Namun, kesempatan terhadap adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan masih terjadi pada banyak pemerintahan desa. Didukung juga oleh hasil wawancara dengan staf Kantor Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

*“ Kantor Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi masih banyak ditemukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan meskipun telah menggunakan sistem informasi dalam penyusunannya. Pada saat penginputan data atau nominal, jika sudah terjadi kesalahan maka tidak dapat langsung dibenarkan pada pengerjaan akhir laporan keuangan, sehingga jika ingin memperbaiki kesalahan tersebut harus menunggu PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Masalah lainnya dalam penyusunan laporan keuangan adalah kurangnya keterampilan, pengetahuan, dan sikap dasar bendahara sebagai sumber daya manusia. Kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih dikatakan mencapai 80% saja dan kualitas Laporan Keuangan Desa Bulurejo masih terdapat revisi.”*

Berdasarkan permasalahan tersebut, membuat peneliti tertarik ingin meneliti faktor apa saja yang memengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang ada di Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi)”** .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Kantor Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan sistem informasi kuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Kantor Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Kantor Desa Bulurejo Kabupaten Banyuwangi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

**2. Bagi Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi mengenai pentingnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**3. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan peneliti selanjutnya.